

Menurut Peter Merlk, politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Sedangkan politik yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri²⁹.

Pada umumnya, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima, baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan hakikat dari politik itu sendiri secara sederhana didefinisikan sebagai segala *hal-ikhwal* yang berkaitan dengan atau menyangkut kekuasaan³⁰.

Sedangkan menurut Surbakti menyatakan 5 pandangan mengenai politik yaitu³¹:

1. Politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
2. Politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
3. Politik sebagai segala kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan kebijakan umum.

²⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 14-16

³⁰ May Rudi, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaan*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2009), hal 29

³¹ Imam Suprayogo, *kiai dan politik...* hal 44

5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Sesuai dengan beberapa varian politik di atas, politik yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan pandangan kedua dan ketiga yaitu politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan politik sebagai segala kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.

c. Keterlibatan Kiai dalam Politik

Keterlibatan kiai dalam permainan politik sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Jika pada zaman pra-kemerdekaan mereka meneriakkan kemerdekaan melalui pesantren (pendidikan), lobi kultural dan perang melawan penjajahan, maka, pasca-kemerdekaan mereka terjun ke dunia politik melalui partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu tahun 2004 yang lalu. Panggung politik nasional selalu diramaikan dengan para kiai yang masuk dalam partai politik. Hal ini tentunya semakin menambah meriah pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Lebih lanjut, kharisma kiai selalu dapat menarik simpati konstituen, karena mereka dianggap orang suci dan doanya selalu *makbul* (diterima) oleh Tuhan.

Menurut Bambang Purwoko, setidaknya ada tiga periode pentas politik elit agama (kiai) dalam percaturan perpolitikan Nasional. *Pertama*, periode 1945 sampai dengan periode tahun 1965, ketika para politisi dengan basis

agama masih bisa berkiprah secara relatif bebas dalam perpolitikan Nasional. Dalam periode ini para elit agama (kiai) yang menjadi politisi selanjutnya disebut sebagai politisi Islam yang bisa menjadi pelaku aktif atau subyek dari permainan politik Indonesia. *Kedua*, masa-masa dimana politisi Islam lebih berperan sebagai obyek yang dibelenggu oleh sistem maupun rezim pemerintahan otoriter Orde Baru yang menganggap kekuatan Islam sebagai musuh besar negara. *Ketiga*, periode antara tahun 1998-2006 yang ditandai dengan kembalinya kebebasan untuk mengekspresikan hak-hak politik warga negara termasuk ekspresi politik para elit Islam³².

Dalam kurun waktu yang cukup pendek sejak tahun 1998 kita telah menyaksikan sedemikian banyak peristiwa politik yang melibatkan para politisi Islam dari berbagai jenis massa. Selama periode ketiga ini pula kita menyaksikan perilaku dan wajah politik yang ternyata tidak tunggal, ada yang bopeng tetapi banyak juga yang mulus.

Sedangkan bentuk keterlibatan kiai dalam politik bisa bersifat ekspresif atau instrumental dan juga bisa lewat *high politics* atau *low politics*. Artikulasi politik *ekspresif* artinya apabila aktivitas yang diambil kiai cenderung mengeksploitasi dan memanipulasi simbol keagamaan maupun penggalangan massa seperti *istighasah* dan *sema'an* Al-Qur'an. Sedangkan artikulasi instrumental adalah artikulasi politik yang lebih menekankan efektivitas untuk

³² Rudi Subiyakto, *Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2006)*: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, hal 46

3) Dimensi visibilitas

Yang dimaksud dimensi visibilitas ini adalah melihat derajat pengakuan baik dari massa yang dipimpinnya maupun pemimpin lainnya. Pemimpin ini digolongkan sebagai *visible leader* apabila didukung massa sekaligus diakui oleh pemimpin lainnya. Akan tetapi apabila pemimpin itu hanya didukung oleh massa dan tidak diakui oleh pemimpin lainnya maka lazimnya dikategorikan sebagai *symbolic leader*. Sebaliknya, apabila pemimpin tidak banyak memperoleh dukungan massa tetapi sebenarnya diakui oleh pemimpin lainnya, maka lazimnya dikategorikan sebagai *concealed leader* (pemimpin tersembunyi).

Dari 3 dimensi kepemimpinan kiai di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kiai pada dasarnya dapat dilihat dari peran dan posisi kiai tersebut. Sedangkan di Indonesia peran kiai cukup berpengaruh dalam kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Kiai adalah tokoh yang mempunyai posisi yang strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi mereka itu terkait dengan kedudukannya sebagai orang terdidik dan kaya dalam masyarakat. Sebagai orang terdidik kiai memberikan pengetahuan Islam kepada para santri. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional adalah sarana penting untuk melakukan transfer pengetahuan terhadap para santri. Dengan kekayaan yang dimilikinya kiai

3. Tipe otoritas Legal-rasional

Dalam tipe ketiga ini, kepatuhan dan kesediaan didasarkan pada aturan yang disusun berdasarkan prinsip dan cara rasional. Dalam hal ini, hukum yang dibentuk secara tertulis dan pertimbangan rasional menjadi landasan ketaatan. Dengan kata lain, hukumlah yang menjadi alat penyelaras dari seluruh gerak langkah guna mencapai tujuan bersama. Ini berarti masyarakat harus dididik untuk menjadi masyarakat yang rasional agar bisa menginternalisasikan hukum dan membentuk perilaku dan karakter sesuai hukum. Sehingga keselarasan antar gerak langkah seluruh elemen masyarakat tercapai dan tujuan bersama juga tercipta. Inilah yang dimaksud dengan otoritas yang didasarkan atas aturan hukum atau otoritas legal.

Jadi, dari ketiga otoritas di atas dapat disimpulkan bahwa otoritas tradisional mendasarkan diri pada tipologi pengawasan dimana legitimasi di dapatkan karena loyalitas bawahan kepada atasan. Sedangkan otoritas kharismatik berdasarkan legitimasi diperoleh karena sifat pribadi yang luar biasa. Sementara otoritas Legal-Rasional berdasarkan kepatuhan bawahan didasarkan atas legalitas formal dalam yuridiksi resmi. Dari ketiga otoritas kepemimpinan tersebut, peneliti menjadikannya sebagai landasan dalam melihat tipologi kepemimpinan kiai dalam pesantren Zainul Hasan Genggong. Dengan demikian, akan mempermudah dalam mengkategorikan

